

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Pengembangan Wisata Syariah (*Halal Tourism*) Di Pulau Santen Banyuwangi

Dedy Wahyu Hernanda
Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya, Malang
e-mail : hernanda_dedy@yahoo.co.id

Abstrak

Kini konsep wisata syariah/*halal tourism* menjadi tren dan *golden opportunity* bagi daerah. Banyuwangi sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya pesisir, laut, dan pulau kecil mencoba untuk mengembangkan dan menarik manfaatnya dari sektor pariwisata dengan bentuk wisata pantai syariah, khususnya di Pulau Santen Kelurahan Karangrejo Banyuwangi. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengembangan wisata syariah di Pantai Pulau Santen. Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik penganalisisan data menggunakan analisis interaktif yang dikemukakan Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengembangan wisata syariah Pulau Santen dilakukan melalui pengembangan produk wisata dengan koordinasi dan pengelolaan destinasi, pengembangan *event* dan atraksi wisata, pengembangan pemasaran, pengembangan lingkungan fisik, sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Kata kunci : pemberdayaan masyarakat, pengembangan wisata, wisata syariah

Empowerment Of Communities In Development Of Sharia Tourism (Halal Tourism) In Santen Island Banyuwangi

Abstract

The concepts of Halal/Sharia Tourism nowadays become a trend as well as another golden opportunity almost in every region. Banyuwangi as one of the regions that have the potential resource of coastal zone, marine and islets now is striving to develop and take advantages from the tourism sector with sharia beach tourism, especially in Santen Island, Karangrejo village, Banyuwangi. The aims of this research are to describe the empowerment of coastal communities in accordance with the development of sharia tourism on the Coast of Santen Island. In conformity with the purpose of the research that has been conveyed, the type of research used within this discourse is descriptive research with a qualitative approach. Data collection is done through interviews, observation, and documentation. Techniques of data analyzing are utilizing interactive analysis proposed by Miles, Huberman, and Saldana. The outcomes of this study specify that the empowerment of coastal communities in the development of Sharia Tourism of Santen Island done through the development of tourism products with the coordination and management of the location, the development of events and tourist attractions, marketing development, expansion of physical environment, social, cultural and economic community.

Keywords: community empowerment, tourism development, sharia tourism

Pendahuluan

Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir. Sebagian besar masyarakat pesisir, baik langsung maupun tidak langsung menggantungkan kelangsungan hidupnya dari mengelola potensi sumber daya perikanan. Seperti juga masyarakat lain, masyarakat nelayan menghadapi sejumlah masalah politik, sosial, dan ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah tersebut di antaranya adalah sebagai berikut : 1). Kemiskinan, ketimpangan sosial, dan tekanan-tekanan ekonomi, 2). Keterbatasan akses modal, teknologi, dan pasar sehingga memengaruhi dinamika usaha, 3). Kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada, 4). Kualitas SDM yang rendah, 5) degradasi sumber daya lingkungan baik di kawasan pesisir laut maupun pulau kecil (Kusnadi:2009).

Atas dasar permasalahan tersebut, pemberdayaan masyarakat pesisir sangat diperlukan. Secara etimologis pemberdayaan berasal pada kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya / kekuatan /kemampuan, dan atau proses pemberian daya / kekuatan /kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Sulistiyani: 2004). Pemberdayaan masyarakat pesisir dapat diartikan sebagai usaha-usaha sadar yang bersifat terencana, sistematis dan berkesinambungan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi dan politik masyarakat pesisir dengan mengelola potensi sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai kesejahteraan sosial yang bersifat berkelanjutan (Kusnadi: 2009). Salah satu bentuk usaha pemberdayaan masyarakat pesisir adalah melalui pariwisata.

Pemberdayaan masyarakat (komunitas setempat) dalam pengembangan sebuah destinasi wisata merupakan salah satu model pembangunan yang mendapatkan perhatian khusus dari berbagai kalangan dan menjadi sebuah agenda penting dalam proses pembangunan kepariwisataan di masa mendatang (Sunaryo:2013). Bertolak dari pendapat diatas, dapat dimaknai bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengembangan destinasi wisata merupakan proses atau strategi yang dilakukan untuk meningkatkan daya/kemampuan masyarakat sehingga bisa mewujudkan kemandirian lokal dengan konstruksi atau kerangka *community based tourism*.

Banyuwangi sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya pesisir, laut, dan pulau kecil mencoba untuk mengembangkan dan menarik manfaatnya dari sektor pariwisata dengan bentuk wisata pantai syariah. Hal ini dilakukan sebagai wujud dari pelaksanaan *Responsibility, Need and Oppurtunities* (RNO). Sebagaimana di jelaskan Zaenuri (2012) bahwa daerah diharapkan dapat mempunyai *Responsibility, Need and Oppurtunities* (RNO) untuk mengembangkan dan menarik manfaat dari sektor pariwisata. Artinya, bahwa pariwisata dapat menjadi *golden oppurtunity* bagi daerah. Pulau Santen atau seringkali disingkat Pusan yang terletak di Kelurahan Karangrejo Banyuwangi disulap dan dijadikan sebagai destinasi wisata pantai syariah (halal) oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Konsep syariah diadopsi karena telah menjadi tren dalam ekonomi global, mulai dari produk makanan dan minuman, keuangan, hingga gaya hidup. Sebagai tren baru

gaya hidup, maka banyak negara yang mulai memperkenalkan produk wisatanya dengan konsep halal dan islami. Bahkan negara seperti Jepang, Australia, Thailand, Selandia Baru dan sebagainya yang notabene bukan negara mayoritas berpenduduk muslim turut membuat produk wisata syariah. Pariwisata syariah dipandang sebagai cara baru untuk mengembangkan pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai islami. Wisata syariah tidak diartikan sebagai suatu wisata ke kuburan (ziarah) ataupun ke masjid, melainkan wisata yang didalamnya berasal dari alam, budaya ataupun buatan yang dibingkai dengan nilai-nilai islam. Kondisi pariwisata syariah di Indonesia masih belum maksimal, padahal jika digarap lebih serius potensi pengembangan wisata syariah di Indonesia sangat besar (Kementerian Pariwisata, 2015).

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat diketahui bahwa konsep wisata pantai syariah (*halal tourism*) yang diadopsi dan diaplikasi oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di destinasi wisata Pulau Santen sebagai bentuk daya tanggap, kebutuhan dan peluang dari permintaan sektor pariwisata yang cenderung dinamis. Konsep pantai syariah (*halal tourism*) bukan hanya diperuntukkan bagi kaum muslim, wisatawan non muslim juga dapat menikmati pelayanan dan produk wisata dengan konsep syariah. Sebagai contoh yang diterapkan di Pulau Santen adalah dengan jaminan fasilitas halal mulai dari makanan halal, minuman non alkohol, adanya pemberitahuan waktu menjelang beribadah (adzan), tempat bersuci, tempat beribadah serta adanya pemisahan antara wisatawan laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, untuk menopang pengembangan wisata syariah / *halal tourism* maka diperlukan kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan melibatkannya sebagai subjek dalam pengembangan destinasi agar mampu memperoleh *multipliers effect* (baik dari ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan) dari pengembangan pariwisata tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengembangan wisata pantai syariah / *halal tourism* di Pulau Santen Kelurahan Karangrejo Kabupaten Banyuwangi ?

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengembangan wisata pantai syariah / *halal tourism* di Pulau Santen Kelurahan Karangrejo Kabupaten Banyuwangi, yang dilihat dari :

- a. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan produk wisata
 - koordinasi dan pengelolaan destinasi
 - pengembangan *event* dan atraksi wisata
- b. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pemasaran
- c. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan lingkungan fisik, sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Adapun lokasi penelitian di Kabupaten Banyuwangi dengan situs penelitian adalah destinasi wisata Pantai Syariah Pulau Santen Kelurahan Karangrejo. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang dimulai dari data *collection*, data *reduction*, data *display* dan data *conclusion drawing/verification*.

Hasil dan Pembahasan

Pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengembangan wisata pantai syariah / *halal tourism* di Pulau Santen Kelurahan Karangrejo Kabupaten Banyuwangi, yang dilihat dari :

- a. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan produk wisata
 - Koordinasi dan pengelolaan destinasi

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa pola koordinasi dan pengelolaan destinasi wisata syariah Pulau Santen dengan “sistem keroyokan”. Maksudnya adalah dalam mengembangkan Pulau Santen sebagai destinasi wisata syariah perlu sinergitas dari lintas sektor yang baik. Aktor yang terlibat dalam pengelolaan destinasi wisata Pulau Santen adalah masyarakat dan tokoh agama, TNI, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas PU, dinas kebudayaan dan pariwisata, dinas Sosial, dinas koperasi dan usaha mikro, dinas perumahan dan pemukiman, dinas pertanian serta Komunitas Hiduplah Indonesia Raya (Hidora). Aktor yang terlibat dalam pengembangan Pulau Santen sebagaimana terlihat dalam ilustrasi berikut :



Gambar 1. Aktor Dalam Pengembangan Pulau Santen
Sumber : Hasil Olahan Penulis

- Pengembangan *Event* dan Atraksi Wisata

Berdasarkan hasil temuan di lapangan ada berbagai upaya menjadikan Pulau Santen menjadi destinasi wisata seperti di antaranya adalah pengembangan *event* (Pusan dijadikan tempat *Launching Banyuwangi Jazz Ethnic* pada awal April lalu) serta adanya pengembangan daya tarik buatan seperti kampung mural. Selain itu juga dilengkapi dengan penambahan komponen seperti fasilitas pendukung wisata, aksesibilitas dan pembentukan kelembagaan guna mendukung pengembangan Pulau Santen sebagai destinasi wisata syariah. Berikut adalah kondisi Pulau Santen sebelum dan sesudah dikembangkan, atraksi wisata buatan serta *event* wisata :



Gambar 2. Sebelum dan Sesudah Pengembangan Pulau Santen
Sumber : Dokumentasi Tim Banyuwangi Sosial Media



Gambar 3. Salah satu atraksi wisata buatan di Pulau Santen
Sumber : Dokumentasi Humas dan Penulis



Gambar 4. Salah satu *event* di Pulau Santen
Sumber : Dokumentasi Tim Banyuwangi Sosial Media

b. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pemasaran

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dapat diketahui bahwa dalam hal pemasaran, pemberdayaan masyarakat Pulau Santen dilakukan dengan *online tourism marketing* melalui sosial media dan penguatan *destination branding*. Dalam konteks Pulau Santen, *destination branding* nya adalah Wisata Pantai Syariah / *Halal Tourism*. Konsep ini di ambil dengan tujuan :

- Diferensiasi Banyuwangi terhadap daerah lain.
- Menggaet pasar *family tourism* yang jumlah belanjanya lebih besar 5 kali dibanding wisatawan individu
- Membidik pasar kelas menengah muslim yang terus tumbuh.

Alasan pengembangan Pulau Santen menggunakan *destination branding* sebagai wisata syariah karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Asia dan MENA (Timur Tengah dan Afrika Utara) memberikan pengaruh terhadap daya beli wisatawan muslim. Sedangkan di Eropa Barat, meskipun pertumbuhan ekonomi tidak tinggi, banyak kalangan kelas menengah muslim dari belahan dunia lain ingin mengeksplorasi tempat-tempat wisata baru. Berikut tabel populasi dan daya beli masyarakat muslim :

Tabel 1. Populasi dan Daya Beli Masyarakat Muslim

<i>Largest Muslim Population</i>	<i>Largest Muslim % of Total Population</i>	<i>Highest Purching Power of Muslim Population</i>
Indonesia	Bahrain	Saudi Arabia
Pakistan	Kuwait	Turkey
India	Saudi Arabia	Iran
Bangladesh	Algaria	Malaysia
Turkey	Iran	Qatar
Egypt	Oman	Rusia
Iran	Turkey	Frace
Nigeria	Yamen	Libya
China	Tunisia	UAE
Ethiopia	Iraq	United States
Algeria	Libya	Algeria
Monaco	Pakistan	Singapore

Sudan	UAE	Indonesia
Afganistan	Qatar	Egypt
Iraq	Egypt	The Natherlands

Sumber : Laporan Akhir Pengembangan Wisata Syariah Kementerian Pariwisata, 2015:15).

Tabel 2. Sepuluh Negara Tujuan OIC (*Organization of Islamic Cooperation*)

Peringkat	Destinasi OIC	Skor
1	Malaysia	83,8
2	Turki	73,8
3	UEA	72,1
4	Saudi Arabia	71,3
5	Qatar	68,2
6	Indonesia	67,5
7	Oman	66,7
8	Jordania	66,4
9	Maroko	64,4
10	Brunei	64,3

Sumber : Laporan Akhir Pengembangan Wisata Syariah Kementerian Pariwisata, 2015:16).

Berdasarkan data dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, belum mampu menjadi negara tujuan wisata bagi *muslim traveller*. Disisi lain, Malaysia mampu memanfaatkannya dalam meningkatkan wisatawan muslim.

Pemberdayaan masyarakat melalui *online tourism marketing* dikarenakan dari total populasi di dunia per Januari 2017 sebanyak 7.476 milyar, sebesar 3.773 milyar adalah pengguna internet serta 2.789 milyar aktif sebagai pengguna sosial media. Sementara itu, penggunaan media sosial terus tumbuh dari tahun ke tahun sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. Peringkat Pertumbuhan Sosial Media

	Negara	Pengguna	%
--	--------	----------	---

1	China	208.873.000	36%
2	India	51.000.000	44%
3	Indonesia	26.000.000	39%
4	Brazil	22.000.000	25%
5	United States	21.000.000	12%
6	Mexico	17.000.000	33%
7	Philippines	13.000.000	32%
8	Vietnam	12.000.000	41%
9	Japan	11.000.000	21%
10	Bangladesh	9.000.000	69%

Sumber : <https://wearesocial.com/>

- c. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan lingkungan (fisik, sosial, budaya dan ekonomi masyarakat)

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan dapat diketahui ada beberapa program pemberdayaan dalam pengembangan lingkungan seperti pelatihan ibu-ibu / istri nelayan dalam pengolahan dan penyajian hasil perikanan, pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah, pelatihan pramuwisata, pelatihan kewirausahaan dalam Festival *Goes to Entrepreneur*. Selain itu juga, adanya pendampingan dalam pembentukan pokdarwis (kelompok sadar wisata). Berikut adalah contoh kegiatan pemberdayaan yang telah dilakukan di Pulau Santen :



Gambar 5. Pelatihan Kuliner di Pulau Santen

Sumber : Dokumentasi Tim Banyuwangi Sosial Media

Akan tetapi, permasalahan utama yang dihadapi masyarakat nelayan Pulau Santen yang mempunyai usaha skala rumahan (*home industry*) adalah produk yang dihasilkan belum bisa menerapkan prinsip 4P (*product, price, place and promotion*) yang implikasinya pada harga jual masih rendah dan tidak mampu bersaing dengan kompetitor di luar. Oleh karena itu, pemberdayaan yang sudah ada harus dilakukan secara berlanjut dan ada pendampingan intensif baik dari segi kelembagaan ekonomi

(Kelompok Usaha Bersama/KUB), kelembagaan sosial (kelompok masyarakat pengawas maupun kelompok sadar wisata) dan kelestarian sumber daya alam fisik.

Secara umum kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan destinasi dilakukan untuk mewujudkan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya dalam kegiatan kepariwisataan dan mewujudkan pemerataan *multiplier effect* pariwisata. Oleh karenanya, pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengembangan wisata pantai syariah / *halal tourism* Pulau Santen Kelurahan Karangrejo Banyuwangi diwujudkan dalam tiga kegiatan pemberdayaan masyarakat yakni :

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan produk wisata

Elemen atau aspek ini digunakan untuk mengembangkan produk destinasi agar dapat memberikan pelayanan wisata yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan wisatawan.

• Koordinasi dan Pengelolaan Destinasi

Pola koordinasi dan pengelolaan destinasi wisata syariah Pulau Santen dengan “sistem keroyokan”. Maksudnya adalah dalam mengembangkan Pulau Santen sebagai destinasi wisata syariah menjalin sinergitas dari lintas sektor. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Sunaryo (2013) bahwa penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik (*good tourism governance*) terwujud apabila adanya koordinasi dan sinkronisasi program antar pemangku kepentingan yang ada serta pelibatan partisipasi aktif yang sinergis (terpadu dan saling menguatkan) antara pihak pemerintah, swasta/industri pariwisata dan masyarakat setempat yang terkait.

Hal tersebut di dukung oleh Sara (2014) bahwa pengelolaan dan perlindungan sumber daya wilayah pesisir dan laut yang efektif harus melibatkan semua lapisan dan golongan masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama dan adat, tokoh pemuda) karena segala kebijakan dan program pemerintah tidak akan berjalan lancar implementasinya tanpa keterlibatan masyarakat. Masyarakat lebih memahami pengelolaan dan perlindungan sumber daya pesisir berdasarkan nilai-nilai yang dianutnya (nilai budaya).

• Pengembangan *Event* dan Atraksi Wisata

Pengembangan *event* wisata merupakan pendukung yang harus dikembangkan dalam pengembangan destinasi, selain dari komponen pokok kepariwisataan. Sebagaimana dijelaskan oleh Sunaryo (2013) bahwa sisi komponen wisata (*tourism supply side*) yang biasanya berwujud sistem destinasi wisata akan terdiri atau menawarkan paling tidak beberapa komponen pokok sebagai berikut : 1). Objek dan daya tarik wisata yang bisa berbasis utama pada alam, budaya atau minat khusus, 2). Akomodasi atau amenities, 3). Aksesibilitas dan transportasi, 4) Fasilitas pendukung pariwisata dan 5). Kelembagaan Unsur/komponen ini bekerja secara sinergis dalam satu kesatuan sistem yang saling menunjang dan melengkapi.

2. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pemasaran

Untuk membidik wisatawan berkunjung ke destinasi baru diperlukan strategi promosi dan *branding* yang tepat untuk target pasar yang diinginkan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Sunaryo (2013) pencitraan (*image building*) sebuah destinasi merupakan bagian dari *positioning* (untuk membantu wisatawan dalam rangka mengetahui perbedaan yang sebenarnya antara suatu destinasi dengan destinasi pesaingnya. Oleh karena itu, *destination branding* merupakan proses kegiatan untuk

menunjukkan suatu produk dari suatu destinasi tertentu yang mempunyai keunikan yang dilihat serta dinilai dari perspektif pasar atau wisatawan sesuai daya tarik yang mereka persepsikan terhadap produk wisata tersebut.

Dalam pemasaran pariwisata, penyertaan teknologi ini disebut dengan istilah *online tourism marketing* (OTM). OTM merupakan usaha untuk menjual produk/jasa pariwisata dan membangun hubungan dengan wisatawan menggunakan internet. OTM mampu memotong batas-batas geografis negara serta mampu meningkatkan akses ke rantai pasokan global (Hasan:2015). Jadi dengan OTM ini berusaha menawarkan berbagai potensi wisata yang dimiliki dengan jangkauan yang luas, sehingga nantinya bisa menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk berkunjung.

3. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan lingkungan (fisik, sosial, budaya dan ekonomi masyarakat)

Keberadaan suatu organisasi yang bergerak dibidang kepariwisataan sangat diperlukan karena untuk mempermudah pengelolaan dan mempercepat pencapaian tujuan pengembangan destinasi wisata. Sebagaimana di Pulau Santen telah dibentuk pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas) dan pokdarwis (kelompok sadar wisata), hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2009 Pasal 5 Huruf e Tentang Kepariwisata bahwa organisasi masyarakat merupakan masyarakat yang mengorganisir dan bertempat tinggal di dalam wilayah destinasi pariwisata dan diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan kegiatan pariwisata tersebut. Hal ini diperkuat pendapat dari Sunaryo (2013) bahwa Pengembangan kelembagaan masyarakat berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat setempat dalam hal pengetahuan organisasi dan keahlian dalam hal pengelolaan dan pengembangan organisasi.

Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan pada prinsipnya harus diarahkan pada pencapaian sasaran utama yakni *multiplier effect* pariwisata dengan penjabaran dalam program sebagai berikut :

- Penguatan kapasitas dan peran masyarakat (terkait dengan upaya meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat untuk turut aktif dalam kegiatan dan proses pembangunan kepariwisataan)
- Penguatan akses dan kesempatan berusaha masyarakat (terkait dengan upaya meningkatkan nilai manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat dari usaha kepariwisataan).
- Penguatan sadar wisata (terkait dengan upaya meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan serta menjadi pelaku usaha, pekerja maupun sebagai wisatawan (Sunaryo:2013).

Sebagaimana paparan di atas, pelatihan kuliner kepada masyarakat nelayan Pulau Santen khususnya untuk pemberdayaan perempuan dilakukan dengan tujuan meningkatkan kinerja dan mengubah penampilan kerja. Hal ini sesuai dengan apa yang di ungkapkan oleh Amanah dan Farmayanti (2014) bahwa perubahan yang diharapkan terjadi melalui pelatihan adalah pengetahuan tentang materi pelatihan, sikap kerja dan keterampilan motorik (*skills*).

Selain itu juga hal yang terpenting dan yang akan dicapai dalam kegiatan pemberdayaan adalah terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat nelayan secara berkelanjutan, kelembagaan sosial ekonomi berfungsi optimal, akses sumber daya

semakin mudah diperoleh, partisipasi politik pembangunan kawasan meningkat, kelangsungan hidup sumber daya lingkungan terpelihara dan dinamika ekonomi kawasan pesisir berkembang (Kusnadi:2009). Oleh karena itu untuk mencapai semua tujuan tersebut dibutuhkan ketersediaan sumber daya (baik sumber daya manusia yang kompeten, finansial, informasi, fasilitas) yang memadai dan jejaring kebijakan dan bisnis kepariwisataan yang kuat antar *stakeholder*.

Simpulan

Tiga kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengembangan destinasi wisata pantai syariah / *halal tourism* Pulau Santen Kelurahan Karangrejo Banyuwangi merupakan wujud dari *Destination Management Organization* (DMO) yang merupakan kewenangan dalam manajemen pengelolaan elemen pembentuk sebuah destinasi wisata. Di samping peningkatan kapasitas dalam berbagai aspek pemberdayaan masyarakat diatas, hal yang terpenting dalam pengembangan Pulau Santen sebagai destinasi wisata syariah / *halal tourism* dengan mengoptimalkan manfaat dari modal sosial (*social capital*) yang dimiliki oleh masyarakat setempat dan melakukan pendampingan intensif serta dilakukan secara berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan karya ilmiah ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua dan semua keluarga yang mendukung baik dari segi motivasi dan finansial pada penelitian ini. Tak lupa ucapkan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Bupati Banyuwangi yang selalu menebar inspirasi dan semangat perubahan, Bapak M.Y Bramuda selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi dan Bapak Yusdi Irawan selaku Camat Banyuwangi atas waktu, kesempatan dan diskusinya. Penulis juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat di sekitar Pulau Santen, kolega dari Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Cabang Banyuwangi khususnya Sdr. Andika, Sdr. Kisma Donna, serta kolega dari Paguyuban Jebeng Thulik Banyuwangi. Dan secara khusus penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Ir. Sukoso, M.Sc, Ph.D dan Dr. Riyanto, M.Hum seorang guru dan pakar di Bidang Wisata Halal dan ahli sosial budaya atas diskusinya yang sangat bermanfaat.

Untuk kesempurnaan karya ilmiah ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Daftar Pustaka

- Amanah, S. F. N. (2014). *Pemberdayaan sosial petani – nelayan, keunikan agro ekosistem dan daya saing*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Andriani, D., dkk. (2015). *Laporan akhir kajian pengembangan wisata syariah*. Jakarta: Kementerian Pariwisata.
- Hasan, Ali. (2015). *Tourism marketing*. Yogyakarta: CAPS.
- Kusnadi. (2009). *Keberdayaan nelayan dan dinamika ekonomi pesisir*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Meda.

- Miles, H. & Saldana. (2014). *Qualitatif data analysis*. United State of America: Sage Publication.
- Sara, La. (2014). *Pengelolaan wilayah pesisir : Gagasan memelihara aset wilayah pesisir dan solusi pembangunan bangsa*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Yogyakarta : Gava Media.
- Sunaryo, Bambang. (2013). *Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
- Wearesocial. *Digital In 2017 Global Overview*. online. <https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview>. Diakses pada tanggal 30 Juli 2017.
- Zaenuri, M. (2012). *Perencanaan strategis kepariwisataan daerah konsep dan aplikasi*. Yogyakarta: E-Gov Publishing.